

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-II Bulan Maret 2021 (tanggal 5 s.d. 11 Maret)



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

KELANJUTAN REVISI UU ITE

Siti Chaerani Dewanti
Peneliti Pertama Bidang Politik Dalam Negeri
Kepakaran Komunikasi Media
siti.dewanti@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Dukungan masyarakat terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya direspons berbeda oleh pihak-pihak terkait. Yang terbaru adalah revisi UU ITE secara resmi tidak dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dikarenakan revisi tersebut masih dikaji dan dalam tahap *public hearing* oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan di masyarakat.

UU ITE pertama kali ditetapkan pada tahun 2008, lalu direvisi secara terbatas tahun 2016. Namun seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, UU ITE ini dianggap tidak dapat menjawab tantangan tersebut, misalnya seperti sistem elektronik, dokumen elektronik, perlindungan data elektronik, hingga kejahatan siber. Belum lagi permasalahan klasik yakni terdapat beberapa pasal yang dinilai beririsan dengan peraturan dan norma-norma lain. Penundaan revisi UU ITE diharapkan tidak berlarut-larut agar segera terciptanya model pengaturan pemanfaatan teknologi internet yang relevan dan seiring dengan kondisi terkini.

SUMBER

Koran Kompas, 8-9 Maret 2021; Detik.com, 8-10 Maret 2021.